

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD) KABUPATEN SAROLANGUN

EVI SUSANTI

Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi

Email :

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon behind the increase in Street Lighting Tax revenues, the growth of Street Lighting Tax revenues and contributions to local taxes and Local Own Revenue (PAD) has decreased. The results of the study concluded that the analysis of the target of Street Lighting Tax Contribution to Regional Original Income set by the Regional Wealth and Asset Management Revenue Service (DPPKAD) of Sarolangun Regency is not in accordance with the potential. This is because the contribution rate of street lighting tax to Local Own Revenue is low, with an average contribution of 0.36%. The results of measuring tax effort (Tax effort) show that the ability to pay taxes in Sarolangun Regency is already optimal, this increase in ability to pay taxes aims to increase tax revenues in the future, in this case especially Street Lighting Tax. The results of the calculation of the effectiveness of Street Lighting Tax show that tax collection in Sarolangun Regency has reached the target (effective), but the realization of Street Lighting Tax has not reached optimal.

Keywords: contribution, tax effectiveness, local income street lighting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dibalik peningkatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis target Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun belum sesuai dengan potensi. Hal ini dikarenakan angka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah yaitu dengan rata-rata kontribusinya 0,36 %. Hasil pengukuran Daya Pajak (Tax effort) menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak di Kabupaten Sarolangun sudah optimal, peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Penerangan Jalan. Hasil perhitungan efektifitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai target (efektif), tetapi realisasi Pajak Penerangan Jalan belum mencapai yang optimal.

Kata kunci : kontribusi, efektivitas pajak, penerangan jalan pendapatan daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponennya. Masyarakat mengelola daerah khususnya Daerah Sarolangun yang merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan ,seinggadaerah diharapkan bisa lebih mengetahui kontribusi dan apa yang terjadi masyarakat berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang kegiatan ekonomi.

Menurut Miyasto (1997), Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memacu untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dibalik peningkatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajaknya belum mencapai optimal. Selain itu, penentuan target dari realisasi Pajak Penerangan Jalan yang hanya berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya membuat realisasinya selalu lebih besar dari targetnya, walaupun itu belum menggambarkan potensi yang sebenarnya

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Penerimaan Daerah

Kententuan umum pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah dan untuk mengaturnya sendiri dalam bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Data primer digunakan untuk mengetahui profil penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun. Data ini menjelaskan bagaimana kondisi riil tentang penerangan jalan, pelaksanaan di lapangan dan rencana-rencana yang akan dilakukan berkaitan tentang penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2006 - 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sarolangun tahun 2006-2010, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sarolangun.
- b. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 2006-2010, bersumber dari PT. PLN Persero APJ Sarolangun.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2006-2010, bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun.

Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sarolangun, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sarolangun, data biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian listrik per golongan tarif bersumber dari PT. PLN Persero APJ Sarolangun dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber Biro Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase bagian dari proses pengajian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan (Maradalis,2003).

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Analisis perhitungan kontribusi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan kontribusi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya kontribusi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali kontribusi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan pertama perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus sebagai berikut : $\text{Tax Base PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$ setelah diperoleh basis pajaknya.

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001) Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riilyang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi komponen dari pajak penerangan jalan terhadap PAD selama periode 2006 - 2010 mengalami fluktuasi yang beragam, hal ini disebabkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah rata rata sebesar 0,36 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. Kontribusi Masing-masing Jenis PAD terhadap Total PAD di kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2010 %.

Tahun	PAD	Pajak Penerangan Jalan	Kontribusi (%)
2006	Rp.256.246.705.519,00	990.795,000	0,38
2007	Rp.390.293.935.693,00	1.304.345,001	0,33
2008	Rp.506.175.778.116,00	1.255.455,000	0,24
2009	Rp.557.653.721.983,00	1.975.430.001	0,35
2010	Rp.492.340.507.918,00	2.589.9000,001	0,52
RATA-RATA			0,36

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sarolangun

Kontribusi Pajak penerangan jalan terhadap PAD pada tahun 2006 - 2008 mengalami penurunan dimana pada tahun 2006 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD sebesar 0,38 % menjadi 0,24 % pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan pajak penerangan jalan yang terus menerus. pada tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 0,35 %. Di akhir tahun 2010 kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD terjadi peningkatan yang signifikan sehingga mencapai angka 0,52 %. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pajak penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun.

Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sarolangun

Penerimaan yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagai sumber penerimaan yang berasal dari pengguna tenaga listrik, dan juga digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Salah satu upaya adalah dengan mengetahui besarnya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan target penerimaan pajak penerangan jalan.

Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sarolangun yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelola pajak penerangan jalan di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai target. Tetapi realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sarolangun belum mencapai potensi penerimaan.

Hasil perhitungan dari efektifitas pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sarolangun selama 2006-2010 memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 111.47 artinya sudah cukup relatif, akan tetapi tahun 2006 yang berkriteria sangat efektif sebesar 155.44 karna over target, perbandingan target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 750,000,000.00 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1,165,792,322.00 berarti pada tahun 2006 Kabupaten Sarolangun sudah efektif dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2007 nilai efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 122.53%

perbandingan target sebesar Rp.900,000,000.00 realisasi yang dapat diterima Pajak Penerangan Jalan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp.1,102,725,909.00 pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Analisis target Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun belum sesuai dengan potensi. Hal ini dikarenakan angka kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah rendah yaitu dengan rata-rata kontribusinya 0,36 %.
2. Hasil pengukuran Daya Pajak (Tax effort) menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak di Kabupaten Sarolangun sudah optimal, peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Penerangan Jalan.
3. Hasil perhitungan efektifitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai target (efektif), tetapi realisasi Pajak Penerangan Jalan belum mencapai yang optimal.

Saran

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui dinas-dinas yang berwenang supaya lebih baik lagi dalam usaha pemungutan-pemungutan Pajak Penerangan Jalan agar berkembang penerimaan pajak kedepannya selalu meningkat dan bersifat positif.

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun agar terus meningkatkan kontribusi pajak di samping itu pemerintah harus memperhatikan pajak supaya lebih efektif dan efisien.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target Kontribusi Pajak Penerangan Jalan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Meningkatkan segi sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan ekonomi yang menjadi objek pajak sebagai bentuk balas jasa atas tidak langsung yang di berikan atas pajak yang dibayarkan.

Secepatnya merealisasikan perencanaan-perencanaan penerangan jalan terutama dalam efisiensi penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan agar biaya listrik dari penerangan jalan biasa di tekan.

Kontribusi daerah perlu di pertahankan konsistensinya dan ditingkatkan secara optimal sesuai dengan potensi perekonomian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2013*. Provinsi Jambi.
- Baihaqi, 2011. "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1. No.3. Hal.246-266.
- Bhakti, A, 2013. "Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" (Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol.1, No.3. Hal.74-75.
- Darise, N, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. PT Indeks Permata Puri Media : Jakarta.
- Mahmudi, I, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. PT Gelora Aksara Pratama : Yogyakarta.
- Mahmudi, I, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan

- Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Sopwan, 2013. *Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2010.* Skripsi FE UNJA KAMPUS SAROLANGUN (Tidak dipublikasikan).
- Tanjung, A, 2009. *Penata Usahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Selemba Empat : Jakarta.
- Widjaja, H, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.* PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Widjaja, H, 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Raja Grafindo : Jakarta.